

BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

1. Sejarah PT. Indonesia Power

Sejarah PT. Indonesia Power berawal pada akhir abad ke 19, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari riwayat perkembangan kelistrikan di Indonesia. Saat itu sejumlah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perkebunan, pabrik gula dan pabrik teh membangun pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya, sebuah perusahaan gas swasta Belanda, bernama NV NIGM (Naamloze Vennootschap Nederlandsche Indische Gas Maatschappij) memperluas usahanya di bidang kelistrikan untuk kepentingan umum dan memperoleh ijin kosesi berdasarkan Ordonansi 1890 No. 190, tanggal 18 September 1890.

Seiring dengan peningkatan manfaat listrik bagi masyarakat, Pemerintah pada tahun 1927 membentuk Lands Waterkracht Bedrijven atau perusahaan listrik Negara yang mengelola Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Plengan, Lamajan, Bengkok Dago, Ubruk dan Kracak di Jawa Barat. Pembangkit-pembangkit inilah yang di kemudian hari diserahkan dan dikelola oleh PLN PJB I.

Pada awal tahun 1990-an Pemerintah Indonesia mempertimbangkan perlunya deregulasi pada sektor ketenagalistrikan. Langkah ke arah tersebut diawali dengan berdirinya Paiton Swasta I, yang dipertegas

dengan dikeluarkannya Kepres No. 37 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Sumber Dana Swasta melalui pembangkit-pembangkit listrik swasta. Kemudian pada akhir tahun 1993, Menteri Pertambangan dan Energi menerbitkan kerangka dasar kebijakan (Sasaran dan Kebijakan Pengembangan Sub Sektor Ketenagalistrikan) yang merupakan pedoman jangka panjang restrukturisasi sektor ketenagalistrikan.

Sebagai penerapan tahap awal, pada tahun 1994 PLN diubah statusnya dari Perum menjadi Persero. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Oktober 1995, PT. PLN (Persero) membentuk dua anak perusahaan dengan tujuan untuk memisahkan misi sosial dan misi komersial dari Badan Usaha Milik Negara tersebut. Salah satu anak perusahaan itu adalah PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I, yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB I. Anak perusahaan ini di tujukan untuk menjalankan usaha komersial ppada bidang pembangkitan tenaga listrik.

PLN pun terus berupaya membangun bidang ketenagalistrikan, sedangkan tugas pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Di Jawa bagian Barat (KJB) dan PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur (KJT).

Pada tahun 1994, status PLN yang semula berbentuk Perusahaan Umum beralih menjadi Persero. Pada tahun 1995 status baru tersebut diikuti dengan perubahan struktur PT. PLN (Persero), yang kemudian bertindak-lanjuti dengan peningkatkan fungsi PLN P2B dengan

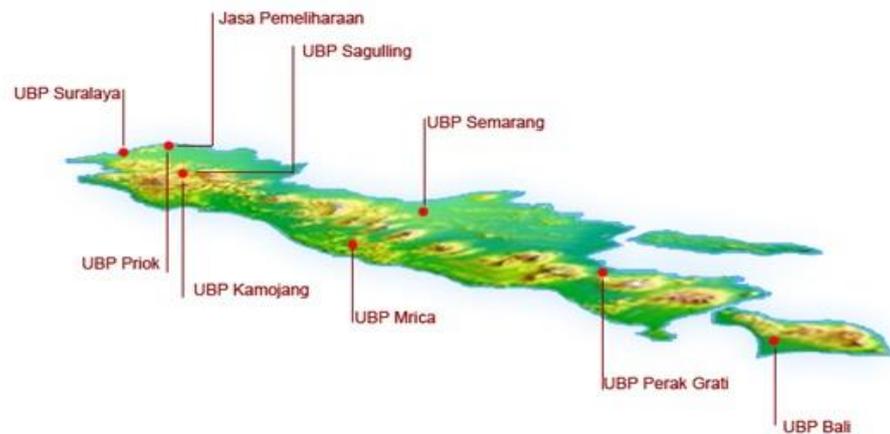
tambahan tugas Penyaluran, menjadi PLN P3B. Dengan perubahan fungsi ini maka KJB dan KJT hanya berfokus pada fungsi Pembangkitan. Dua organisasi inilah yang menjadi cikal bakal anak Perusahaan PLN, yakni Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali I (PJB I) dan Pembangkit Listrik Jawa Bali II (PJB II).

Didirikan pada 3 Oktober 1995 sebagai anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I) merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak dalam usaha pembangkitan tenaga listrik didirikan pada 3 Oktober 1995. Pada tanggal 3 Oktober 2000, manajer perusahaan secara resmi mengumumkan perubahan nama PLN PJB I menjadi PT. Indonesia Power. Perubahan ini merupakan upaya untuk menyikapi persaingan yang semakin ketat dalam bisnis ketenagalistrikan dan sebagai persiapan untuk privatisasi perusahaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Lebih dari sekedar perubahan nama, langkah tersebut merupakan penegasan atas tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkitan indenpenden yang berorientasi murni bisnis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di pasar ketenagalistrikan Indonesia, termasuk meningkatnya persaingan serta kebutuhan untuk melakukan privatisasi melalui sebuah IPO (*Initial Public Offering*).

PT. Indonesia Power memiliki sejumlah unit pembangkit dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Pembangkit tersebut memanfaatkan teknologi modern berbasis komputer dengan menggunakan beragam energi primer

air, minyak, batubara, panas bumi, gas dan sebagainya. Namun demikian, dari pembangkit-pembangkit tersebut ada pula sejumlah pembangkit yang termasuk paling tua di Indonesia seperti PLTA Plengan, PLTA Ubrug, PLTA Ketenger dan sejumlah PLTA lainnya yang dibangun tahun 1920-an dan sampai sekarang masih beroperasi. Dari sini dapat dipandang secara kesejarahan pada dasarnya usia PT. Indonesia Power sama dengan keberadaan listrik di Indonesia.



Gambar II.1 Unit Bisnis Pembangkitan PT. Indonesia Power

2. Logo, Visi dan Misi PT. Indonesia Power

a. Logo PT. Indonesia Power



Gambar II.2 Logo PT. Indonesia Power

Makna bentuk dan warna logo perusahaan PT. Indonesia Power merupakan cerminan identitas dan lingkup usaha yang dimilikinya.

Karena nama yang kuat Indonesia dan Power ditampilkan dengan menggunakan jenis huruf (*font*) yang tegas dan kuat, yaitu *futura book/regular* dan *futura bold*. Aplikasi bentuk kilatan petir pada huruf “O” melambangkan tenaga listrik yang merupakan lingkup usaha utama perusahaan. Titik atau bulatan merah (*red hot*) di ujung kilatan petir merupakan simbol perusahaan yang telah digunakan sejak masih bernama PT PLN PJB I. Titik ini merupakan simbol yang digunakan di sebagian besar materi komunikasi perusahaan. Dengan simbol yang kecil ini diharapkan identitas perusahaan dapat langsung diwakili.

Pengaplikasian warna merah pada kata Indonesia, menunjukkan identitas yang kuat dan kokoh sebagai pemilik sumber daya untuk memproduksi tenaga listrik, guna dimanfaatkan di Indonesia dan juga di luar negeri. Sedangkan warna biru pada kata *Power* ini menunjukkan produksi tenaga listrik yang dihasilkan perusahaan memiliki ciri-ciri berteknologi, efisien, aman dan ramah lingkungan.

b. Visi PT. Indonesia Power

“Menjadi Perusahaan Energi Terpercaya yang Tumbuh Berkelanjutan”.

c. Misi PT. Indonesia Power

Menyelenggarakan Bisnis Pembangkit Tenaga Listrik dan Jasa Terkait yang Bersahabat dengan Lingkungan.

B. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Perusahaan (Lampiran 7)

Struktur organisasi PT. Indonesia Power UPJP Priok, dimana pimpinan paling atas dikelola oleh *General Manager* sebagai pembuat keputusan. Dibawah *General Manager* para Ahli Tata Kelola, para *Manager*, *Supervisor* dan Karyawan

a. *General Manager*

Tugas *General Manager*:

1. Menyusun dan mengembangkan serta merumuskan tujuan dan kebijaksanaan perusahaan secara umum.
2. Menetapkan rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek mengenai kegiatan perusahaan
3. Mengawasi para ahli dan *manager* dalam melaksanakan tugasnya
4. Mengevaluasi dan menganalisa setiap laporan berkala yang diterima dari para ahli dan *manager*.

b. Ahli Tata Kelola

Tugas Ahli Tata Kelola:

1. Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja di departemen atau bidangnya kepada *General Manager*.
2. Membantu *General Manger* dalam pengawasan terhadap kegiatan perusahaan karena para ahli ini hanya mengawasi dibidang keahliannya saja.
3. Mengevaluasi dan menganalisa setaip kendala yang dihadapi

c. *Manager*

Tugas *manager*:

1. Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja di departemennya kepada *General Manager*
2. Mengevaluasi kinerja *Supervisor* dan karyawan dalam setiap *divisi*.
3. Memberikan peringatan mengenai kinerja atau permasalahan apapun yang ditimbulkan oleh karyawan dalam setiap *divisi*.
4. Menerima dan mengambil keputusan
5. Melakukan hubungan kerja sama dengan bagian-bagian atau departemen terkait dalam menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab.

d. *Supervisor*

Tugas *Supervisor*:

1. Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja di departemennya kepada *Manager*
2. Membuat laporan berkala untuk *Maneger*
3. Menerima dan mengambil keputusan
4. Memastikan seluruh kewajiban dan tanggung jawab departemen berjalan sesuai dengan *job description*.
5. Memberikan peringatan kepada *staff* yang berada dibagiannya.
6. Menganalisa sistem atau prosedur dalam departemennya

7. Berhubungan dengan bagian-bagian terkait dalam menyelesaikan masalah.

e. Karyawan atau *Staff*

Tugas karyawan atau *Staff*:

1. Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja kepada *supervisor* yang terkait.
2. Melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan *job description*.
3. Berhubungan dengan bagian-bagian atau departemen terkait dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Struktur Organisasi Divisi Akuntansi dan Anggaran (Lampiran 8)

Dalam kegiatannya Divisi Akuntansi dan Anggaran bertanggung atas prosedur dan hasil pekerjaannya kepada *Manager Administrasi*. Tugas Divisi Akuntansi dan Anggaran pada PT. Indonesia Power UPJP Priok adalah melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, melaporkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perhitungan dalam membuat penganggaran dan keuangan perusahaan. Berikut tugas dan tanggung jawab bagian Akuntansi dan Anggaran pada PT. Indonesia Power:

a. Ahli muda akuntansi

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan evaluasi secara berulang, melakukan koordinasi pemrosesan transaksi keuangan, menyajikan informasi data dari laporan keuangan, melakukan

rekonsiliasi atas saldo akuan dalam laporan keuangan, membuat laporan keuangan dan lampiran-lampirannya, menyiapkan data dan informasi yang relevan dan melakukan koordinasi teknis pelaksanaan inventarisasi di akhir periode.

b. Ahli muda anggaran

Memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian anggaran, menganalisis sistem prosedur dan kebijakan anggaran, menyampaikan usulan sistem dan prosedur anggaran, menganalisa kesesuaian rencana pengadaan barang dan alokasi anggaran, memonitor penetapan anggaran tahunan dan membuat laporan monitoring dan membuat laporan penyerapan realisasi anggaran,

c. Pelaksana senior akuntansi

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan proses validasi sebagai dasar accrual akuntansi secara periodik atas setiap kontrak, menyusun laporan pendukung, rekonsiliasi, menyusun lampiran-lampiran pendukung dan menjalankan proses inventarisasi fisik.

d. Pelaksana akuntansi

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan entry invoice pembayaran ke dalam aplikasi, melikan validasi dalam sistem aplikasi, melakukan pencetakan bukti kas masuk dan keluar, melakukan entry invoice dan melakukan kegiatan pengarsipan atas setiap dokumen.

e. Pelaksana senior anggaran

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasukan data dan hasil pembahasan anggaran secara rutin, melkukan verifikasi dokumen permohonan penerbitan anggaran, membuat laporan monitoring pekerjaan dan melaksanakan dokumentasi berkas-berkas anggaran.

f. Pelaksana anggaran

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menginput data hasil pembahasan anggaran ke dalam aplikasi, melakukan verifikasi data atau dokumen, menyiapkan data pendukung untuk permintaan anggaran tahunan dan melaksanakan dokumentasi berkas-berkas.

C. Kegiatan Umum PT. Indonesia Power

PT. Indonesia Power menjalankan kegiatan umum sebagai penyedia tenaga listrik melalui pembangkit listrik dan sebagai pengeyedia jasa operasi dan pemeliharaan listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia. Delapan unit bisnis pembangkitan (UBP) yang tersebar di UBH lokasi-lokasi strategis Jawa-Bali yaitu UBP Suralaya, UBP Priok, UBP Saguling, UBP Kamojang, UBP Mrica, UBP Semarang, UBP Perak dan Grati, UBP Bali, serta satu Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan terbesar di pulau Jawa dan Bali dengan total kapasitas terpasang 8.996 MW dari 133 unit pembangkit listriknya.

Dalam menyuplai kebutuhan akan tenaga listrik dari Jawa-Bali dari tahun 1997 sampai 2003 tidak hanya PT. Indonesia Power yang menyuplai

tetapi juga pembangkit yang lain, yaitu IPP dan PJB, seperti diperlihatkan pada tabel II.1.

Perusahaan	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PT. Indonesia Power	33.627	33.812	37.054	40.487	40.987	41.849	44.374
PT. PJB	25.766	25.672	27.095	26.115	27.828	26.902	26.417
IPP	1.585	1.431	3.752	8.225	12.409	17.738	19.151
Jumlah	60.978	60.915	67.901	74.826	81.224	86.489	89.941

Tabel II.1 Daya Terpasang (MW) Sistem Jawa-Bali